



# Ekonomi Biaya Hidup di Indonesia

Antara Pendapatan, Harga,  
dan Perlindungan Sosial

Oleh:  
*Rudy C Tarumingkeng*

*Rudy C Tarumingkeng* : *Ekonomi Biaya Hidup di Indonesia - Antara  
Pendapatan, Harga, dan Perlindungan Sosial*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

5 Maret 2026

## EKONOMI BIAYA HIDUP DI INDONESIA: ANTARA PENDAPATAN, HARGA, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

### 1. Pendahuluan: “Biaya Hidup” sebagai Fenomena Ekonomi-Politik yang Nyata

Istilah **biaya hidup** sering terdengar sederhana: “harga-harga naik, gaji tidak ikut naik.” Namun, secara akademik, biaya hidup adalah **cara ekonomi menangkap pengalaman keseharian rumah tangga**—berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan standar hidup tertentu (makan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, energi, dan kebutuhan sosial lain). Ia bukan sekadar angka inflasi; ia adalah **relasi** antara (1) kemampuan memperoleh pendapatan, (2) dinamika harga dan ketersediaan barang/jasa, serta (3) sejauh mana negara hadir sebagai *shock absorber* melalui perlindungan sosial.

Dalam kerangka ini, “ekonomi biaya hidup” bukan hanya topik statistik, melainkan **agenda pembangunan**: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi daya beli yang stabil dan rasa aman sosial? Indonesia, sebagai negara besar dengan keragaman wilayah dan struktur pekerjaan formal–informal yang kompleks, memperlihatkan bahwa biaya hidup adalah medan pertemuan antara ekonomi makro, struktur pasar, rantai pasok pangan–energi, serta kapasitas kebijakan publik.

Contoh paling mudah terlihat ketika momentum musiman—Ramadan dan Idulfitri—mendorong kenaikan permintaan pangan dan mobilitas. Pemerintah pada awal 2026 menyiapkan stimulus untuk menjaga daya beli, salah satunya penyaluran bantuan pangan (beras dan minyak goreng) kepada puluhan juta keluarga, berbasis data desil kesejahteraan terendah. ([Media Keuangan](#)) Ini menegaskan bahwa biaya hidup bukan sekadar “urusan pasar,” melainkan juga “urusan tata kelola”: data penerima, desain intervensi, dan ketepatan sasaran.

---

## 2. Kerangka Konseptual: Segitiga Biaya Hidup (Pendapatan–Harga–Perlindungan Sosial)

### 2.1. Pendapatan: kapasitas rumah tangga menghasilkan arus kas

Pendapatan rumah tangga tidak identik dengan gaji bulanan. Di Indonesia, pendapatan sering bersumber dari:

kerja formal bergaji tetap,

kerja informal (harian, mingguan, proyek),

usaha mikro (warung, jasa, kerajinan),

remitansi keluarga,

pendapatan musiman (panen, bonus, THR),

dan dukungan pemerintah (bansos).

Karena itu, analisis biaya hidup harus menilai **stabilitas** pendapatan, bukan hanya besarnya. BPS, misalnya, mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) November 2025 sebesar **4,74%**, sementara rata-rata upah buruh tercatat **Rp3,33 juta**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka “rata-rata” ini menyembunyikan variasi besar antar sektor, wilayah, serta status kerja (formal vs informal).

## 2.2. Harga: inflasi sebagai ringkasan, tetapi “keranjang” sebagai cerita

Indeks Harga Konsumen (IHK) merangkum perubahan harga “keranjang konsumsi” rumah tangga. Namun, biaya hidup nyata dirasakan melalui **komposisi pengeluaran**. Jika rumah tangga miskin menghabiskan porsi besar pendapatan untuk pangan, maka kenaikan harga pangan akan jauh lebih “menyakitkan” dibanding kenaikan harga barang tahan lama.

Pada Februari 2026, BPS melaporkan inflasi tahunan (y-on-y) **4,76%**, inflasi bulanan (m-to-m) **0,68%**, serta inflasi komponen inti (y-on-y) **2,63%**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Ini memberi petunjuk penting: tekanan biaya hidup sering datang dari komponen non-inti (pangan bergejolak dan harga yang diatur), sementara komponen inti relatif lebih stabil.

## 2.3. Perlindungan sosial: “penyangga” agar guncangan harga tidak menjadi krisis sosial

Perlindungan sosial bekerja sebagai jaring pengaman agar:

guncangan harga,

kehilangan kerja,

sakit,

bencana,

atau penurunan pendapatan musiman

tidak mendorong rumah tangga jatuh ke kemiskinan ekstrem.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah merencanakan **anggaran perlindungan sosial (perlinsos) Rp508,2 triliun** (RAPBN 2026), naik dibanding outlook 2025 Rp468,1 triliun.

([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id)) Dokumen yang sama menekankan perbaikan basis data dan program utama seperti **PKH dan Kartu Sembako**

sebagai instrumen perlindungan dan pengurangan kesenjangan.

([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id))

---

### 3. Membaca Kondisi Indonesia Terkini: Data Kunci yang Membentuk Narasi Biaya Hidup

#### 3.1. Inflasi dan sasaran stabilitas harga

Bank Indonesia menyatakan inflasi IHK 2025 terkendali; inflasi tahunan 2025 tercatat **2,92% (yoy)** dan berada dalam sasaran **2,5±1%**. ([Bank Indonesia](#)) Namun, memasuki 2026, tekanan dapat meningkat—terutama dari pangan dan faktor musiman—terlihat dari inflasi Februari 2026 yang lebih tinggi secara tahunan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara konseptual, ini mengajarkan dua hal:

**“Stabilitas inflasi tahunan”** bisa koeksis dengan episode-episode “lonjakan harga” pada kelompok tertentu (pangan, transportasi, energi).

Biaya hidup bukan hanya “apakah inflasi tinggi,” melainkan **inflasi di kelompok apa** dan **siapa yang paling terpapar**.

#### 3.2. Kemiskinan dan ketimpangan: biaya hidup selalu punya dimensi distribusi

BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar **8,25%** atau **23,36 juta** orang; kemiskinan perkotaan **6,60%** dan perdesaan **10,72%**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Sementara ketimpangan pengeluaran (gini ratio) September 2025 sebesar **0,363**, dengan perkotaan **0,383** dan perdesaan **0,295**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Biaya hidup “lebih keras” bagi kelompok rentan karena dua sebab:

basis pendapatan mereka rapuh,

dan kenaikan harga pada komoditas dasar langsung memangkas konsumsi esensial (protein, pendidikan, kesehatan).

### 3.3. Garis kemiskinan sebagai “batas biaya hidup minimum”

Garis kemiskinan adalah indikator yang sangat dekat dengan topik biaya hidup karena ia menggambarkan ambang pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar. Dalam rilis/profil yang merujuk dokumen BPS, garis kemiskinan September 2025 disebut sekitar **Rp641.443 per kapita per bulan**. ([BPS Web API](#))

Walau garis ini bukan “standar hidup layak” yang ideal, ia penting sebagai rambu: kenaikan harga pangan/energi dapat mendorong rumah tangga yang “hampir miskin” (near poor) melintasi garis tersebut.

---

## 4. Dimensi Pendapatan: Mengapa “Naik Gaji” Tidak Otomatis Menang Biaya Hidup?

### 4.1. Upah minimum dan gagasan “penghidupan yang layak”

Kebijakan pengupahan di Indonesia mengakui tujuan normatif: pemenuhan hak pekerja atas **penghidupan yang layak**. Dalam PP No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, narasi kebijakan menekankan penguatan kebijakan yang responsif terhadap ekonomi/hukum dan memastikan pemenuhan hak penghidupan layak; juga mengatur indeks tertentu pada formula upah minimum dan mendorong struktur skala upah untuk produktivitas.

Namun, dari perspektif biaya hidup, upah minimum menghadapi tiga realitas:

**Sebagian besar pekerja berada di sektor informal** sehingga tidak terlindungi penuh oleh instrumen upah minimum.

**Upah nominal** harus dibandingkan dengan inflasi (upah riil). Jika inflasi pangan meningkat, upah nominal yang naik tipis dapat tetap berarti penurunan daya beli.

Kenaikan upah yang tidak diimbangi produktivitas dapat memicu respons perusahaan: pengetatan rekrutmen, otomatisasi, atau pengalihan kerja menjadi kontrak/outsourcing—yang pada akhirnya kembali menekan stabilitas pendapatan rumah tangga.

#### **4.2. Pekerjaan dan pendapatan sebagai “ arus kas” (cash flow), bukan sekadar angka tahunan**

Dalam kehidupan nyata, rumah tangga tidak membayar belanja dengan “PDB per kapita.” Mereka bertahan dengan arus kas harian/mingguan. Sebuah keluarga pekerja informal bisa mengalami:

pendapatan tinggi saat pesanan ramai,

lalu turun drastis saat sakit atau musim sepi, sementara harga pangan tidak menunggu.

Di sinilah ekonomi biaya hidup perlu memakai kacamata **kerentanan**: rumah tangga yang tidak miskin secara statistik pun bisa rapuh jika pengeluaran tetap (sewa rumah, cicilan, sekolah, transport) lebih cepat naik daripada pendapatan.

---

### **5. Dimensi Harga: Mengapa Pangan dan Energi Menjadi “Jantung” Biaya Hidup?**

#### **5.1. Pangan: komponen paling sensitif bagi rumah tangga rentan**

Kenaikan harga pangan sering menjadi pendorong utama keluhan biaya hidup karena:

frekuensi pembelian tinggi,

porsi pengeluaran besar (terutama kelompok bawah),

dan elastisitas substitusi terbatas (orang tetap harus makan).

BPS pada Februari 2026 menunjukkan inflasi yang tidak kecil secara bulanan dan tahunan, dengan komponen inti tetap lebih rendah daripada inflasi total, memberi sinyal adanya tekanan dari non-inti.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Di level kebijakan, pengendalian inflasi pangan biasanya mengandalkan sinergi pusat–daerah (TPIP/TPID), stabilisasi pasokan, operasi pasar, serta penguatan logistik.

## **5.2. Energi: subsidi sebagai “penahan guncangan” sekaligus sumber dilema fiskal**

Energi memengaruhi biaya hidup lewat dua jalur:

langsung: rumah tangga membeli BBM, LPG, listrik, transport;

tidak langsung: energi menaikkan biaya produksi-distribusi pangan dan barang lainnya.

Pemerintah merencanakan subsidi energi 2026 dan mendorong transformasi subsidi agar lebih tepat sasaran; dalam salah satu paparan fiskal disebut alokasi **Rp210,1 triliun** untuk subsidi energi (BBM, listrik, LPG 3 kg) pada 2026. ([DJPB Kemenkeu](#))

Di Nota Keuangan RAPBN 2026, tabel belanja subsidi menunjukkan total subsidi 2026 **Rp318,9 triliun**, dengan subsidi energi **Rp210,1 triliun** dan rincian seperti listrik serta BBM/LPG. ([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id))

Dilema klasiknya:

Subsidi membantu menahan inflasi dan menjaga daya beli,

tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran bisa menyedot anggaran yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial, dan dapat dinikmati relatif lebih besar oleh kelompok yang konsumsi energinya tinggi.

## **6. Dimensi Perlindungan Sosial: Dari “Bansos” ke Arsitektur Ketahanan Rumah Tangga**

### **6.1. Perlinsos sebagai desain “shock absorber”**

Nota Keuangan RAPBN 2026 menempatkan perlindungan sosial sebagai penyangga risiko sosial dan menyebut program-program seperti PKH, Kartu Sembako, serta perbaikan basis data untuk ketepatan sasaran.

([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id))

Selain anggaran besar perlinsos (Rp508,2 triliun), ada pula pembahasan fungsi perlindungan sosial (fungsi dalam klasifikasi anggaran) dan arah program. ([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id))

### **6.2. PKH: bantuan bersyarat sebagai investasi manusia**

PKH dirancang sebagai bantuan tunai bersyarat untuk mendorong akses kesehatan dan pendidikan. Definisi PKH sebagai bantuan sosial bersyarat untuk keluarga/seseorang miskin dan rentan tercantum dalam regulasi Kemensos. ([jdih.kemensos.go.id](http://jdih.kemensos.go.id))

Secara ekonomi biaya hidup, PKH bekerja bukan hanya menutup “defisit pengeluaran,” tetapi menurunkan risiko jangka panjang (drop-out sekolah, gizi buruk, kesehatan ibu-anak).

### **6.3. Program Sembako/Kartu Sembako: meredam gejolak pangan pada kelompok terbawah**

Program pangan non-tunai/transformasinya menjadi Kartu Sembako adalah instrumen kunci saat volatilitas pangan tinggi. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menegaskan kelanjutan program utama seperti PKH dan Kartu Sembako, serta penajaman basis data agar tepat sasaran. ([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id))

#### **6.4. Bantuan pangan musiman: ilustrasi kebijakan biaya hidup “yang sangat konkret”**

Pada 3 Maret 2026, Media Keuangan Kemenkeu menjelaskan stimulus Ramadan–Idulfitri 2026: bantuan pangan untuk **35,04 juta** keluarga penerima manfaat (desil 1–4), dengan paket **10 kg beras dan 2 liter minyak goreng**; penyaluran sekaligus untuk dua bulan, berbasis DTSEN dan penugasan BULOG. ([Media Keuangan](#))

Ini contoh nyata bagaimana negara merespons biaya hidup yang berpotensi melonjak karena faktor musiman dan ekspektasi publik.

---

### **7. Ilustrasi Naratif: Membaca Biaya Hidup dari “Anggaran Rumah Tangga”**

#### **7.1. Keluarga pekerja informal di pinggiran kota**

Bayangkan keluarga A: suami pengemudi harian, istri berjualan makanan kecil. Saat harga beras dan minyak goreng naik menjelang Ramadan, margin usaha mengecil: menaikkan harga berisiko kehilangan pembeli, tapi mempertahankan harga menggerus pendapatan. Pada saat yang sama, kebutuhan sekolah anak (seragam, transport, kuota internet) tidak menurun.

Di titik ini, **biaya hidup** adalah gabungan dari:

tekanan harga pangan (harian),

pendapatan yang fluktuatif (mingguan),

dan kebutuhan sosial yang rigid (bulanan).

Ketika bantuan pangan (beras dan minyak goreng) turun tepat waktu, tekanan jangka pendek mereda—bukan karena harga turun drastis, tetapi karena “keranjang konsumsi” keluarga A mendapat substitusi langsung dari negara. ([Media Keuangan](#))

## 7.2. Pekerja formal bergaji menengah di kota besar

Keluarga B punya gaji tetap dan tidak masuk penerima bansos. Namun, beban utama mereka adalah **sewa/kontrak rumah, cicilan, dan transport**. Inflasi umum mungkin terlihat moderat, tetapi kenaikan biaya transport (termasuk yang dipengaruhi harga energi) dan pendidikan dapat menciptakan “inflasi personal.”

Inilah sebabnya perdebatan biaya hidup sering muncul dari kelas menengah: mereka tidak miskin secara statistik, namun “ruang napas” anggaran mengecil.

## 7.3. Rumah tangga perdesaan dengan pendapatan musiman

Keluarga C bertani/berkebun: pendapatan besar saat panen, rendah di luar musim. Jika harga pangan naik sementara pendapatan belum masuk, mereka terpaksa:

mengurangi protein,

menunda biaya kesehatan,

atau menjual aset kecil.

Kemiskinan perdesaan yang lebih tinggi daripada perkotaan (10,72% vs 6,60%) memperlihatkan bahwa kerentanan semacam ini masih kuat.

[\(Badan Pusat Statistik Indonesia\)](#)

---

## 8. Mengapa Biaya Hidup Mudah Menjadi Isu Politik dan Moral?

Biaya hidup menyentuh tiga lapis “keadilan”:

**Keadilan harga:** apakah harga pangan wajar, apakah rantai pasok adil bagi petani sekaligus terjangkau bagi konsumen?

**Keadilan pendapatan:** apakah upah dan kesempatan kerja cukup untuk hidup layak? Kerangka “penghidupan yang layak” secara normatif hadir dalam kebijakan pengupahan.

**Keadilan perlindungan:** apakah bansos tepat sasaran, meminimalkan *inclusion/exclusion error*, dan responsif terhadap guncangan? Nota Keuangan RAPBN menekankan perbaikan basis data seperti DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran. ([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id))

Ketika ketiga aspek ini tidak selaras, biaya hidup mudah berubah dari isu ekonomi menjadi isu legitimasi sosial.

---

## 9. Agenda Kebijakan: Menjahit Pendapatan–Harga–Perlindungan Sosial

### 9.1. Pilar 1 — Menguatkan pendapatan melalui produktivitas dan kualitas kerja

dorong penciptaan kerja formal dan semi-formal yang lebih stabil, perluas pelatihan berbasis kebutuhan industri/daerah,

perkuat *structure and scale of wages* agar kenaikan pendapatan terkait produktivitas (sejalan arah kebijakan pengupahan).

### 9.2. Pilar 2 — Stabilitas harga pangan lewat logistik, data, dan tata kelola

memperbaiki cold chain, distribusi antardaerah, dan pengurangan *post-harvest loss*,

memperkuat operasi stabilisasi saat puncak musiman,

memperbaiki koordinasi TPIP/TPID dan digitalisasi pemantauan harga (logika sinergi pengendalian inflasi juga tampak dalam narasi BI). ([Bank Indonesia](http://BankIndonesia))

### 9.3. Pilar 3 — Perlindungan sosial adaptif dan berbasis data

memperkuat DTSEN sebagai basis penentuan sasaran (desil 1–4) dan mempercepat *ground verification*,

menghubungkan bansos dengan pemberdayaan (akses kerja, akses modal mikro),

menjaga kombinasi bantuan tunai (PKH), bantuan pangan (Kartu Sembako), dan perlindungan kesehatan (PBI/JKN) sebagai “paket ketahanan rumah tangga.” ([media.kemenkeu.go.id](http://media.kemenkeu.go.id))

### 9.4. Pilar 4 — Reformasi subsidi energi: dari komoditas ke penerima manfaat

transformasi subsidi agar lebih tepat sasaran disebut sebagai arah kebijakan; anggaran subsidi energi besar menuntut ketepatan desain. ([DJPB Kemenkeu](http://DJPB.Kemenkeu))

tujuan akhirnya bukan “menghapus penyangga,” melainkan **mengalihkan penyangga** ke kelompok yang benar-benar membutuhkan, sambil menjaga stabilitas inflasi.

---

## 10. Kesimpulan: Biaya Hidup sebagai Ukuran Kualitas Pembangunan

Ekonomi biaya hidup pada dasarnya adalah **ujian kualitas pembangunan**. Ketika inflasi rendah tetapi kemiskinan/ketimpangan tetap terasa, publik tetap mengeluh. Ketika upah naik tetapi pekerjaan makin tidak stabil, rasa aman tetap turun. Ketika bansos besar tetapi data tidak akurat, kepercayaan publik melemah.

Indonesia memiliki modal kebijakan yang kuat:

kerangka stabilitas inflasi (sasaran  $2,5 \pm 1\%$  dan pengendalian 2025 yang terkendali), ([Bank Indonesia](http://Bank Indonesia))

kapasitas statistik yang memberi peta kemiskinan dan ketimpangan, ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

serta komitmen fiskal perlindungan sosial yang besar dalam RAPBN 2026, ([media.kemenkeu.go.id](#))

ditambah intervensi konkret pada periode musiman seperti Ramadan–Idulfitri 2026. ([Media Keuangan](#))

Tantangannya adalah menjahit ketiganya menjadi satu arsitektur:

**pendapatan yang lebih stabil, harga yang lebih terkendali terutama pangan–energi, dan perlindungan sosial yang adaptif serta tepat sasaran.** Di situlah “biaya hidup” tidak lagi sekadar keluhan sosial, tetapi berubah menjadi indikator bahwa pembangunan benar-benar hadir dalam dapur, meja makan, sekolah, dan kesehatan warga.

## Glosarium

**Biaya hidup (cost of living):** Total pengeluaran yang diperlukan rumah tangga untuk mempertahankan standar hidup tertentu (pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, energi, dll.).

**Daya beli:** Kemampuan pendapatan rumah tangga untuk membeli “keranjang” barang/jasa; turun bila harga naik lebih cepat daripada pendapatan.

**Desil kesejahteraan (desil 1–10):** Pembagian populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan/pengeluaran/pendapatan; desil 1–4 sering dipakai untuk menyorot 40% penduduk terbawah dalam program bantuan.

([Media Keuangan](#))

**DTSEN:** Basis/kerangka data yang digunakan pemerintah untuk penajaman sasaran bantuan pada paket stimulus tertentu (mis. Ramadan–Idulfitri 2026). ([Media Keuangan](#))

**Exclusion error:** Rumah tangga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan (salah sasaran karena terlewat).

**Inclusion error:** Rumah tangga yang tidak berhak tetapi menerima bantuan.

**Garis Kemiskinan:** Ambang pengeluaran minimum (pangan + nonpangan) untuk memenuhi kebutuhan dasar; pada September 2025 tercatat Rp641.443 per kapita per bulan. ([BPS Web API](#))

**Gini Ratio:** Ukuran ketimpangan pengeluaran (0 = merata sempurna; 1 = timpang sempurna); September 2025 tercatat 0,363. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**IHK (Indeks Harga Konsumen):** Indeks yang mengukur perubahan harga “keranjang konsumsi” rumah tangga (indikator inflasi). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Inflasi (umum/headline inflation):** Kenaikan tingkat harga barang/jasa secara umum, diukur melalui perubahan IHK; Februari 2026 y-on-y 4,76% dan m-to-m 0,68%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Inflasi inti (core inflation):** Komponen inflasi yang relatif persisten (lebih mencerminkan tekanan permintaan/ekspektasi); Februari 2026 y-on-y 2,63%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Inflasi m-to-m (month-to-month):** Perubahan IHK bulan berjalan terhadap bulan sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Inflasi y-on-y (year-on-year):** Perubahan IHK suatu bulan terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Inflasi y-to-d (year-to-date):** Perubahan IHK dari awal tahun hingga bulan berjalan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Komponen administered prices:** Kelompok harga yang dipengaruhi kebijakan pemerintah (mis. tarif/BBM tertentu).

**Komponen volatile food:** Kelompok pangan yang harganya mudah bergejolak (dipengaruhi musim/cuaca/pasokan).

**Kompensasi energi:** Pembayaran pemerintah untuk menutup selisih biaya/penugasan tertentu pada sektor energi agar harga ke publik tidak melonjak (sering dibahas bersama subsidi). ([Kemenkeu Media](#))

**Near-poor (kelompok rentan miskin):** Rumah tangga sedikit di atas garis kemiskinan yang mudah jatuh miskin saat ada guncangan harga/pendapatan.

**Operasi pasar / stabilisasi:** Intervensi penyaluran/penjualan komoditas tertentu untuk meredam lonjakan harga.

**PBI/JKN:** Skema bantuan iuran dan jaminan kesehatan nasional (sering diposisikan sebagai pilar perlindungan sosial kesehatan dalam kebijakan anggaran). ([Kemenkeu Media](#))

**Perlindungan sosial (perlinsos):** Program/anggaran untuk melindungi rumah tangga dari risiko sosial-ekonomi; RAPBN 2026 merencanakan Rp508,2 triliun. ([Kemenkeu Media](#))

**PKH (Program Keluarga Harapan):** Bantuan sosial bersyarat bagi keluarga/seseorang miskin dan rentan (mis. syarat terkait kesehatan/pendidikan). ([BPK Regulations](#))

**Program Sembako/Kartu Sembako:** Bantuan pangan (non-tunai/transformasi program) untuk menjaga konsumsi pangan kelompok rentan; disebut sebagai program utama dalam arsitektur perlinsos. ([Kemenkeu Media](#))

**Subsidi energi:** Dukungan fiskal untuk menjaga keterjangkauan energi (BBM, listrik, LPG 3 kg); untuk 2026 disebut Rp210,1 triliun dalam paparan kebijakan. ([DJPB Kemenkeu](#))

**Sasaran inflasi (inflation target):** Rentang inflasi yang dituju otoritas moneter; BI menyampaikan sasaran  $2,5 \pm 1\%$  untuk 2026–2027. ([Bank Indonesia](#))

**Shock absorber (penyangga guncangan):** Peran kebijakan (bansos/subsidi) dalam meredam dampak lonjakan harga/penurunan pendapatan agar tidak menjadi krisis rumah tangga.

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka):** Persentase angkatan kerja yang menganggur; November 2025 tercatat 4,74%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Upah nominal vs upah riil:** Upah nominal adalah angka rupiah yang diterima; upah riil adalah upah nominal yang “d disesuaikan” dengan inflasi (daya beli).

**Upah minimum:** Upah terendah yang ditetapkan pemerintah (UM/UMP/UMK) dalam kerangka regulasi pengupahan. ([JDIH Kemnaker](#))

---

## Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, 2 Maret). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen* (Press release). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen* (Press release). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363* (Press release). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah*

buruh sebesar 3,33 juta rupiah (Press release). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, September). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025* [PDF]. ([BPS Web API](#))

Bank Indonesia. (2026, 6 Januari). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran* (News release). ([Bank Indonesia](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 2 Juli). *Nota Keuangan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026: Buku II* [PDF]. ([Kemenkeu Media](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 3 Maret). *Stimulus Ramadan–Idulfitri 2026, Pemerintah kucurkan bantuan pangan bagi 35 juta keluarga penerima manfaat* (Media Keuangan). ([Media Keuangan](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). (2025, 15 November). *Menjaga denyut energi Indonesia melalui RAPBN 2026* (Opini). ([DJPB Kemenkeu](#))

Republik Indonesia. (2025, 17 Desember). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan* [PDF]. ([JDIH Kemnaker](#))

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 (metadata peraturan)*. ([JDIH Kemnaker](#))

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan* [PDF]. ([BPK Regulations](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 15 Agustus). *RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan untuk mewujudkan Indonesia maju* [Siaran pers PDF]. ([Kemenkeu Media](#))

*Rudy C Tarumingkeng* : *Ekonomi Biaya Hidup di Indonesia - Antara  
Pendapatan, Harga, dan Perlindungan Sosial*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 5 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a94b1b-12d8-83a1-9529-e5939d80f3c6>